

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN
LINGKUNGAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

RARAS HALIDA RAHMI

NIM. 12030110120048

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Raras Halida Rahmi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120048
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN**
Dosen Pembimbing : Prof. Drs. H. Arifin, M.Com., Hons., Ph.D., Akt

Semarang, 10 Februari 2014

Dosen Pembimbing,

Prof. Drs. H. Arifin, M.Com., Hons., Ph.D., Akt

NIP. 196 00909 198 703 1023

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Raras Halida Rahmi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120048
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 5 Maret 2014

Tim Penguji:

1. Prof. Drs. H. Arifin, M.Com., Hons., Ph.D., Akt (.....)
2. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, M.Acc., Akt. (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Raras Halida Rahmi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Lingkungan**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Februari 2014
Yang membuat pernyataan,

Raras Halida Rahmi
NIM. 12030110120048

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of corporate governance structure on environmental disclosure of a firm. To measure the corporate governance structure consisting of 5 proxy there are independent board is using the proportion of independent board, institutional ownership is using the percentage of institutional investors, board size is using the total number of commissioners, the proportion of women directors is using the ratio of the number of women directors to the total number of directors and sizes audit committee using the total number of audit committee members in the firm, while to measure the amount of environmental disclosure using the GRI disclosure items. This study also used several control variables are firm size as measured by total assets and operating revenues, profitability is measured using ROA and the type of industry that is measured using a dummy variable.

The population in this study consists of all the entire company incorporated in NCSR in year 2009, 2010, 2011 and 2012. The sampling method used in this study is purposive sampling. By doing sampling and processing data, the final amounts of the sample are 60 samples from 15 firms in one year. This study uses linear regression as an analysis technique to examine the hypotheses.

The analysis showed that both institutional ownership and audit committee size have significant positive influence on environmental disclosure. While the proportion of independent board of commissioner, board size and proportion of women director did not significantly affect environmental disclosure. From these results it can be concluded that the structure of corporate governance positive influence on the environmental disclosures.

Keyword: *corporate governance structure, environmental disclosure, sustainability report, GRI*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan. Untuk mengukur struktur *corporate governance* yang terdiri dari 5 proksi yaitu dewan komisaris independen menggunakan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional menggunakan presentase investor institusional, ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah total dewan komisaris, proporsi direksi wanita menggunakan perbandingan jumlah direksi wanita dengan total jumlah direksi dan ukuran komite audit menggunakan jumlah total anggota komite audit dalam perusahaan, sedangkan untuk mengukur pengungkapan lingkungan menggunakan jumlah item pengungkapan dalam GRI. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang diukur menggunakan total aset dan pendapatan operasi, profitabilitas yang diukur menggunakan ROA serta jenis industri yang diukur menggunakan variabel dummy.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang tergabung dalam NCSR tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Setelah melalui tahap *sampling* dan pengolahan data, didapatkan sampel akhir yang layak diobservasi yaitu 60 sampel yang terdiri dari 15 perusahaan tiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear untuk menguji hipotesis penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa baik kepemilikan institusional dan ukuran komite audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Sedangkan dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris serta proporsi direksi wanita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur *corporate governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Kata kunci: struktur *corporate governance*, pengungkapan lingkungan, laporan berkelanjutan, GRI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Al Insyirah: 5)

“A goal without a plan is just a dream”

“Never stop learning because life never stops teaching”

“Don’t give up because of something someone said. Use that as motivation to push harder”

“Never give up on something you really want. It is difficult to wait but worse to regret”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Papa, Mama, serta Kakak Adikku tersayang

Keluarga besar Papa dan Mama yang baik hati

Sahabat-sahabat tercinta

Keluarga besar R1 Akuntansi 2010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Lingkungan” dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Drs. H. Arifin, M.Com., Hons., Ph.D., Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan dosen pembimbing lanjutan.
4. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali.

5. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Orang tua tercinta, Papa Amin Nugroho dan Mama Niniek Sumartini, kakakku Anindita Almira Luthfi, serta adikku Naufal Adi Nugroho. Terima kasih atas cinta, restu, doa, semangat, dan dukungan yang telah diberikan.
7. Nenekku tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang dan dukungannya.
8. Pakdhe, Budhe, Om serta Tante dari keluarga besar Orang tua tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian serta dukungannya.
9. Ahlan Fauzi dan Tito Nur Adityo Nugroho, terima kasih untuk motivasi dan *sharing* selama penyusunan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, Kak Nurani, Kak Norma, Kak Watek dan Kak Devi. Terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan. Saat-saat bersama kalian menjadi cerita yang tak akan terlupakan.
11. MOSHA. Terima kasih atas memori yang indah selama ini, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.
12. Sahabat semenjak SMA yaitu Raiza, Riri, Rhea, Rona, Ebeth dan Dhila terima kasih untuk kasih sayang, waktu, *support*, dan semangat yang diberikan.

13. Shika Family yaitu Shika, Celad, Arya, Jean, Ani, Gratia, Rezky, Aviv, Kurnia sebagai sahabat serta teman diskusi yang paling baik.
14. Nur Amalia Fitriani, Rezky Eko Prasetyo, Fatimah, Fitri Apriliana, Rizkita Amalinda Hartono, Indu Prasetya sebagai teman satu bimbingan serta teman diskusi yang baik selama ini.
15. Pasangan Akuntansi Undip R1 2010 yaitu Anitya Ardiyani Puspita dan Andi Rachmanda yang telah menjadi teman yang selalu membantu saya selama ini.
16. Keluarga besar Akuntansi Undip R1 2010. Terimakasih atas kebersamaannya selama 4 tahun ini, semoga kita semua sukses dan dapat menjaga silaturahmi sampai kapanpun.
17. Teman-teman KKN Desa Wonokerso, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang yaitu Roy, Lia, Melina, Dewi, Riska, Nalal, Ais, Anang, dan Mas Dedi yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II TELAAH PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Teori Agensi	18
2.1.2 Teori Legitimasi	20
2.2 Pengungkapan Lingkungan	23
2.3 <i>Corporate Governance</i>	27
2.3.1 Pengertian CG.....	27
2.3.2 Prinsip dasar CG	29
2.3.3 Struktur CG	30
2.3.3.1 Dewan Komisaris Independen	31

2.3.3.2 Kepemilikan Institusional.....	32
2.3.3.3 Ukuran Dewan Komisaris	33
2.3.3.4 Proporsi Direksi Wanita	34
2.3.3.5 Ukuran Komite Audit.....	35
2.4 Penelitian terdahulu	35
2.5 Kerangka Pemikiran	42
2.6 Pengembangan Hipotesis	46
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	54
3.1.1 Variabel Dependen	54
3.1.2 Variabel Independen	55
3.1.3 Variabel Kontrol	58
3.2 Populasi dan Sampel.....	60
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	60
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	61
3.5 Metode Analisis Data.....	62
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	62
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	62
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	62
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas	64
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	64
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	65
3.5.3 Analisis Regresi Linear	66
3.5.4 Uji Hipotesis	67
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	67
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (F test)	68
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parsial (T test)	68
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	69
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	69
4.2 Analisis Data	71
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	71

4.2.2 Uji Asumsi Klasik	74
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	74
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	76
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	78
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	80
4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis	81
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	81
4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F test)	82
4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (T test).....	83
4.3 Pembahasan Hipotesis	90
4.3.1 Hipotesis 1	90
4.3.2 Hipotesis 2	91
4.3.3 Hipotesis 3	92
4.3.4 Hipotesis 4	93
4.3.5 Hipotesis 5	95
4.3.6 Variabel Kontrol	96
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	102
5.3 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Objek Penelitian	70
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	71
Tabel 4.3 Uji K-S.....	76
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	78
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas	80
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi	81
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi	82
Tabel 4.8 Uji Statistik F	83
Tabel 4.9 Uji Statistik t	84
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1 Normal P-Plot.....	75
Gambar 4.2 Uji Scatterplot.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Pedoman GRI	108
LAMPIRAN B Data Perusahaan yang menjadi sampel	111
LAMPIRAN C OUTPUT SPSS 20.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas alasan yang menjadi latar belakang masalah mengenai sebab-sebab dilakukannya penelitian tentang *corporate governance* dihubungkan dengan pengungkapan lingkungan pada perusahaan di Indonesia. Latar belakang tersebut menjadi landasan rumusan penelitian yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan diuraikan pada bab ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini, permasalahan lingkungan hidup telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, bahkan saat ini masalah lingkungan hidup telah menjadi isu global dan penting untuk dibicarakan karena menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Pentingnya isu lingkungan hidup tersebut ditandai dengan maraknya pembicaraan dalam agenda politik, ekonomi, dan sosial, khususnya masalah pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas hidup. Berbagai hal yang berkaitan dengan isu lingkungan, dampaknya akan meluas ke bidang yang lainnya. Tanpa adanya kesadaran untuk merawat lingkungan hidup dengan menciptakan suatu koordinasi yang baik antar sesama manusia, kelangsungan lingkungan hidup belum tentu dapat terjaga.

Salah satu isu utama yang mendapat perhatian besar masyarakat dunia adalah pencemaran lingkungan hidup oleh suatu industri. Pengusaha industri

dituntut untuk merubah sistem manajemen lingkungan agar sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pada tahun 1993, ketika heboh kebocoran pipa PT. Inti Indorayon Utama, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmaja segera menyerukan untuk melakukan audit lingkungan atas aktivitas perusahaan ini. Banyak peneliti yang mengungkapkan bagaimana pentingnya suatu organisasi untuk mempertimbangkan pengaruh yang mereka timbulkan terhadap lingkungan dan untuk diungkapkan kepada sejumlah *stakeholder* yang mungkin dipengaruhi (Deegan, 1994), termasuk karyawan, konsumen, komunitas, para pembuat peraturan, media, masyarakat dan pemegang saham (Adams and Zuthsi, 2004).

Pengungkapan mengenai lingkungan secara luas menyediakan informasi yang berhubungan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan (Deegan, 2006). Pelaporan kinerja lingkungan tidak hanya membantu perusahaan untuk memperoleh dukungan *stakeholder* namun juga membantu perusahaan untuk menilai resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan operasi dan untuk mengurangi dampak dari kegiatan operasi perusahaan terhadap lingkungan. Dengan kata lain, perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada para pemegang saham, karyawan, konsumen dan masyarakat sekitar untuk melaporkan segala bentuk kegiatan produksinya yang berhubungan dengan lingkungan ke dalam bentuk sebuah pelaporan lingkungan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi pengungkapan lingkungan sebagai dasar evaluasi.

Berdasarkan banyaknya tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan harus menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (*profit*) dengan kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*) atau disebut *triple bottom-line performance* (Elkington's, 1998). Penyelarasan ketiga kinerja tersebut pada akhirnya akan membuat perusahaan dapat menjalankan operasinya secara legal dalam jangka panjang dan mampu menghasilkan keuntungan yang berlimpah atau keuntungan yang konsisten secara terus menerus.

Di Indonesia yang semula pada awalnya pengungkapan lingkungannya bersifat *voluntary*, saat ini mulai meningkat secara perlahan menjadi pengungkapan lingkungan yang lebih bersifat *mandatory*. Perubahan sifat mengenai pengungkapan lingkungan tersebut dikarenakan oleh semakin lama dirasakan semakin banyak dampak lingkungan yang dihasilkan atas aktivitas dalam kegiatan bisnis perusahaan. Sebagaimana menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Saat ini, sebenarnya undang – undang yang mengatur mengenai wajibnya suatu perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan atas dampak yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang dilaksanakan masih menimbulkan pro kontra. Pada awalnya peraturan tersebut dirasa sangat merugikan bagi perusahaan dan banyak pelaku bisnis yang menolak apabila pengungkapan mengenai lingkungan dijadikan sebagai kewajiban korporasi (*mandatory*) alasannya karena hal itu hanya akan membebani dunia usaha dan membuat banyak perusahaan bangkrut.

Selain itu, juga akan mengganggu iklim usaha dan investasi serta memicu korporasi multinasional enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Deegan (1999) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan adalah hal yang paling penting dalam sebuah organisasi untuk keberadaan jangka panjang dan organisasi harus memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mungkin dapat membahayakan reputasi dan kelangsungan hidup organisasi tersebut.

Di tengah negara yang masih diselimuti budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti Indonesia ini, independensi dari pengungkapan lingkungan yang dilakukan akan dipertanyakan. Perusahaan tersebut berusaha untuk menempuh berbagai cara agar publikasi dari pelaporan lingkungan mendapatkan hasil yang baik demi menghasilkan keuntungan. Ullman (1985) menyatakan ada dua perspektif dalam melakukan kegiatan sosial perusahaan. Pertama, membangun *image* diantara *stakeholder*, menyokong keuntungan dan kepercayaan dari beragam kelompok *stakeholder*. Kedua, kegiatan sosial membawa dampak positif terhadap reputasi perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi dari perspektif strategis. Jika dilaksanakan, praktek pengungkapan lingkungan yang terjadi sekarang ini berindikasi pada praktek *public relation* belaka sehingga terkesan *imagesentris* untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor.

Pentingnya pengungkapan mengenai lingkungan dalam bentuk sebuah pelaporan khusus telah meningkat selama beberapa tahun terakhir dan semakin banyak perusahaan menyadari bahwa pelaporan lingkungan merupakan kegiatan yang sangat penting. Bagi perusahaan, pengungkapan lingkungan dapat

membantu perusahaan untuk mengidentifikasi resiko dan mengetahui cara penghematan biaya. Lebih lanjut, dengan adanya pengungkapan lingkungan maka dapat mengubah tingkat pengembalian keuangan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan meskipun tidak begitu bisa dihitung (Adams dan Zutshi, 2004). Tetapi karena adanya penekanan yang tidak semestinya atas ketaatan dan perundang-undangan yang berlaku, maka banyak perusahaan yang menggunakan pengungkapan lingkungan hanya untuk mengevaluasi dan membuktikan ketaatan. Pandangan seperti ini sangat sempit dan tidak menunjukkan alasan-alasan yang lebih positif untuk melaksanakan pengungkapan tersebut.

Menurut Frimpong dan Owusu (2012), sebuah pengungkapan sosial dan lingkungan memiliki potensi untuk bertindak sebagai alat manajemen risiko yang berguna untuk menilai kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan sosial dan lingkungan. Melalui pengungkapan tersebut, entitas memiliki potensi untuk menghindari risiko penuntutan dan denda akibat pelanggaran potensi hukum lingkungan dan peraturan (*www.bcorporation.net*). Hal ini terutama berlaku bagi organisasi-organisasi yang terlibat dalam industri yang dapat memberikan dampak pencemaran berbahaya. Selain itu, sebagai perusahaan yang berkelanjutan, para pemangku kepentingan organisasi mungkin memiliki harapan yang tinggi untuk kinerja lingkungan perusahaan (ibid). Fenomena ini mengindikasikan bahwa pengungkapan lingkungan lingkungan merupakan hal yang penting dalam aktivitas dimana perusahaan tersebut berada.

Faktanya, tidak semua perusahaan melaksanakan kewajiban untuk mengungkapkan mengenai permasalahan lingkungannya dengan benar. Meskipun

pengungkapan lingkungan telah diatur oleh Undang-Undang, debat mengenai "kewajiban" pengungkapan lingkungan masih bergaung. Melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 Paragraf 9, "Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting". PSAK menjadi awal pemicu mengenai pengungkapan atas laporan mengenai lingkungan. Ketika dalam penelitian ini dikaitkan dengan bidang akuntansi, maka seorang akuntan dapat menjadi sosok yang mempunyai peran penting karena adanya akses bagi mereka untuk masuk ke dalam informasi keuangan sebuah perusahaan. Penilaian serta perhitungan yang dilakukan oleh akuntan akan mempermudah manajer dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan serta pelestarian lingkungan. Selain itu, dalam disiplin ilmu akuntansi *dislosure* biaya lingkungan telah lama dirumuskan dan keberadaannya dirasakan semakin penting. Akuntansi mempunyai peranan penting sebagai media pertanggungjawaban publik (*public accountability*) atas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan.

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang secara spesifik dalam lingkup pengungkapan lingkungan yaitu dengan menguji hubungan antara pengungkapan lingkungan dan dengan berbagai indikator dari *corporate governance*. Peningkatan pelaporan lingkungan dapat dicapai dengan *corporate governance* yang kuat, dimana mencakup penyediaan informasi lingkungan kepada *stakeholder* yang sah (Gibson dan O'Donovan, 2007). Perusahaan dengan

struktur *corporate governance* efektif pasti telah menjalankan kewajibannya untuk melaporkan segala sesuatu yang menimbulkan dampak bagi lingkungan atas aktivitas bisnis yang telah dilakukan dan memiliki akses pengalaman yang lebih mudah ke pasar modal. Secara keseluruhan, penelitian ini memprediksi bahwa perusahaan yang beroperasi dalam bidang yang menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar dengan peraturan yang ketat, maka dalam hal *corporate governance*, harus menampilkan kualitas yang lebih tinggi dan nilai yang relevan terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian sebelumnya tentang pengungkapan lingkungan meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan (Pratama, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya menyangkut *good corporate governance* (GCG) saja namun juga menambahkan variabel independen yaitu kinerja lingkungan untuk melihat pengaruhnya terhadap pengungkapan lingkungan. Dalam penelitian Pratama (2013) menggunakan variabel proksi GCG yaitu proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit. Pengungkapan lingkungan disini diukur dengan menghitung jumlah item yang diungkapkan perusahaan dibagi dengan jumlah item pengungkapan lingkungan GRI.

De Villiers *et al* (2009) meneliti mengenai *Good Corporate Governance* dan kinerja lingkungan perusahaan dengan sampel 100 perusahaan top di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan kinerja lingkungan perusahaan sebagai variabel dependen serta ukuran perusahaan, investor institusional, proporsi

direktur independen dan CEO rangkap sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja lingkungan perusahaan berhubungan positif dengan ukuran perusahaan, berhubungan negatif dengan investor institusional, berhubungan positif dengan proporsi dari direktur independen dan berhubungan negatif dengan CEO rangkap.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kathyayini, Kathy., Carol A. Tilt, Laurence H. Lester, (2012). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel *corporate governance* yang meliputi komisar independen (*board independence*), kepemilikan institusi (*institutional ownership*), ukuran dewan (*board size*) dan proporsi wanita dalam dewan (*proportion of female directors*) dengan sampel 100 perusahaan yang listing pada *Australian Stock Exchange (ASX)* pada tahun 2008.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kathyayini, *et al.* (2012). Perbedaan tersebut yaitu mengenai variabel ukuran dewan komisar (*board size*) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia menerapkan sistem dua tingkat atau *two tier board system* yang memisahkan fungsi direksi dan fungsi pengawasan (dewan komisar), serta terdapat penambahan variabel independen yaitu jumlah komite audit untuk lebih memperkuat penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap *enviromental disclosure*. Selain itu pengambilan sampel penelitian dilakukan di Indonesia dengan berfokus pada perusahaan yang tergabung dalam *National Centre Sustainability Reporting* pada Tahun 2009 -2012. Perusahaan yang tergabung dalam *National Centre Sustainability Reporting* dipilih sebagai sampel karena

perusahaan tersebut belum banyak dijadikan sebagai sampel penelitian, biasanya hanya berfokus pada perusahaan manufaktur dan pertambangan saja. Perusahaan dipilih juga berdasarkan usahanya yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan yang digunakan untuk menjalankan bisnis usahanya dengan menggunakan indikator GRI, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk perusahaan keuangan. Perbankan juga termasuk sampel karena berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 15b). Dengan demikian, pengambilan sampel tersebut dapat terkait dengan penelitian ini yang membahas tentang *environmental disclosure*.

Di Indonesia, kajian tentang pengungkapan lingkungan sudah pernah ditulis pada penelitian terdahulu, kebanyakan hanya menulis tentang keseluruhan mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada perusahaan dan belum fokus pada salah satu elemen yang cukup penting dari CSR tersebut yaitu elemen lingkungan pada suatu perusahaan. Sedangkan *corporate governance* sebagai variabel independen telah banyak digunakan untuk diteliti pengaruhnya terhadap pengungkapan lingkungan, namun belum banyak yang menggunakan proporsi direktur wanita dalam dewan direksi sebagai salah satu bagian dari struktur *corporate governance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari variabel struktur *corporate governance* ditemukan adanya *research gap* antara penelitian satu dengan yang lain. Untuk itu, dalam penelitian ini mencoba untuk menulis kembali kajian tentang pengaruh dewan komisaris independen, *institutional ownership*, ukuran

dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan direksi dan ukuran komite audit sebagai proksi dari struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan di sebuah perusahaan dengan maksud untuk membuktikan dan menyelesaikan persoalan *research gap* serta mengevaluasi unjuk kerja (*performance*) atau kinerja perusahaan dalam melakukan usaha bisnisnya terhadap lingkungan. Dengan demikian dapat diketahui permasalahan yang ada dalam perusahaan sehingga dapat ditindaklanjuti dan diberikan solusinya.

Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis lebih dalam terkait pengungkapan lingkungan dilakukan secara wajib serta pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Unjuk kerja suatu perusahaan sangat penting diketahui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan hal itu, secara otomatis keuntungan perusahaan dapat meningkat pula.

Berdasarkan uraian diatas mengenai latar belakang permasalahan dan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan lingkungan dengan judul “PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN” (Studi Empiris pada Perusahaan yang tergabung dalam *National Centre Sustainability Reporting* pada Tahun 2009 - 2012).

1.2 Rumusan Masalah

Isu mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pengungkapannya merupakan isu terkini yang banyak diperdebatkan dan menarik perhatian para

peneliti. Suatu pengungkapan lingkungan yang didukung dengan *corporate governance* yang kuat merupakan kunci dari keberlangsungan sebuah perusahaan. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan mengkomunikasikan informasi ke berbagai stakeholders untuk menyesuaikan dengan harapan masyarakat (Ashforth dan Gibbs, 1990). Terkadang, informasi yang diungkapkan tidak sesuai dengan kinerja lingkungan perusahaan yang sesungguhnya (Cong dan Freedman, 2011). Hal tersebut dikarenakan perusahaan selalu ingin mendapatkan citra yang positif dari masyarakat atas usaha yang dilakukan. Selain itu, perusahaan yang memiliki kinerja ekonomi yang baik cenderung untuk tidak melaporkan kinerja lingkungannya (Donovan dan Gibson dalam Sembiring, 2002).

Suatu legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs, 1990; Dowling dan Pfeffer, 1975; O'Donovan, 2002, Ghozali dan Chariri, 2007). Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam (Lindblom, 1994; Dowling dan Pfeffer, 1975; Ghozali dan Chariri, 2007). Ketidaksesuaian antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan *legitimacy gap* yang seringkali dapat mempengaruhi kelanjutan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan (Dowling dan Pfeffer, 1975; Ghozali dan Chariri, 2007).

Legitimacy gap dapat terjadi karena karena tiga alasan (Warticl dan Mahon, 1994; Ghozali dan Chariri, 2007): 1. Ada perubahan dalam kinerja

perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah; 2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah; 3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. Penelitian ini perlu dilakukan kembali untuk membuktikan bahwa pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu hasil kesesuaian antara nilai-nilai yang diinginkan perusahaan dengan masyarakat.

Penelitian pengungkapan lingkungan ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang memiliki perbedaan pengembangan teori, perumusan logika hipotesis, dan objek penelitian sehingga ada *research gap*. Contohnya terdapat perbedaan hasil penelitian antara Djoko Suhardjanto (2010) dan Yesika (2013) yang melakukan penelitian mengenai hubungan *Corporate Governance* dan pengungkapan lingkungan. Djoko Suhardjanto (2010) menemukan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan Yesika (2013) menemukan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut belum mampu membahas secara mendalam dan riil ke dalam suatu kasus tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan yang sesungguhnya serta terdapat beberapa perbedaan hasil yang perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi unjuk kerja (*performance*) dari perusahaan sehingga dapat diketahui kinerja perusahaan, serta dapat

membuktikan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan berusaha untuk menjawab pertanyaan :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
4. Apakah proporsi direksi wanita berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan .
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan.

4. Untuk menganalisis pengaruh proporsi direksi wanita terhadap pengungkapan lingkungan.
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan lingkungan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada banyak pihak diantaranya :

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literatur yang membantu di dalam perkembangan ilmu akuntansi dan menambah wawasan tentang pengungkapan terhadap lingkungan yang sebenarnya atas aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Perusahaan

- a. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai acuan standar pelaksanaan operasi dan prosedur pengelolaan termasuk tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta perubahan proses produksi perusahaan.

- b. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai acuan koordinasi pelaksanaan pengungkapan lingkungan dengan *stakeholders*. Koordinasi ini penting agar diperoleh hasil pengungkapan lingkungan yang independen.
 - c. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan dalam penggunaan sumber daya melalui efisiensi bahan baku dan bahan penolong, alat identifikasi melalui proses daur ulang atau penerapan produksi bersih dan penghematan energi.
 - d. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan untuk menghindari kerugian finansial seperti penutupan / penghentian operasional kegiatan oleh Pemerintah dan menghindari sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan standar lingkungan.
4. Bagi Masyarakat
- a. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai jaminan untuk menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - b. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penuntutan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Jika pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dipandang masyarakat belum sesuai dengan apa yang diharapkannya maka masyarakat dapat

ikut berpartisipasi dengan mengungkapkan aspirasinya terhadap kegiatan pengungkapan lingkungan sebagai salah satu bentuk penuntutan kepada perusahaan tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian akan disusun menjadi 5 bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang definisi pengungkapan lingkungan, fenomena pengungkapan lingkungan, peraturan perundang-undangan pengungkapan lingkungan, serta alasan yang mendasari penelitian ini. Perumusan masalah berisi tentang apa saja masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian berisi tentang apa yang akan dicapai dari penelitian ini. Sedangkan manfaat penelitian berisi tentang hasil apa saja yang bisa diperoleh bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dengan adanya penelitian ini.

BAB II. TELAAH PUSTAKA

Pada bab II ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Dalam bab ini dibahas pula mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan bagaimana kerangka teoritis dari penelitian ini serta memaparkan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab III ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dibahas mengenai sumber data, metode pengumpulan

data, dan setting tempat serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bab IV ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

BAB V PENUTUP

Pada bab V ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: (i) teori agensi dan teori legitimasi yang menjadi landasan teori penelitian ini dan konsep-konsep mengenai *enviromental reporting* meliputi definisi, penyebab, dan akibat yang ditimbulkan serta penjelasan konsep mengenai mekanisme *corporate governance*, (ii) uraian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (iii) pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian penelitian terdahulu yang dirangkai dengan kerangka pemikiran.

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi yang menyatakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen dan teori legitimasi yang menyatakan bahwa terdapat suatu kontrak sosial antara perusahaan yang beroperasi sebagai pemakai sumber ekonomi dengan masyarakat sekitar yang dapat merugikan perusahaan terkait dengan keberlangsungan usahanya apabila melanggar kontrak sosial.

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan keagenan, terjadi sebuah kontrak antara satu atau lebih pihak, yaitu pemilik (prinsipal), dengan pihak lain, yaitu agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Prinsipal yang dimaksud adalah pemegang saham (investor) sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah manajemen

perusahaan. Berdasarkan pendelegasian wewenang pemilik kepada agen, manajemen sebagai agen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Kepentingan kedua pihak tersebut tidak selalu sejalan sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Agen berkewajiban memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham (prinsipal) tetapi di sisi lain manajer juga bertindak untuk memaksimalkan kesejahtraannya. Secara tidak langsung dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut akan memicu adanya konflik kepentingan. Konflik yang terjadi antara agen dan prinsipal disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika manajer sebagai pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan *stakeholders* sebagai pihak eksternal. Dengan adanya hubungan kontrak kedua belah pihak maka terjadinya manipulasi untuk meningkatkan utilitas masing-masing sangat mungkin terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah agensi adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Banyak peneliti yang menyarankan mekanisme *corporate governance* sebagai salah satu solusi untuk masalah agensi (Eng dan Mak, 2003; Shan, 2009). Selain itu, *corporate governance* juga sebagai salah satu cara untuk mengurangi kurangnya komitmen atas manajemen yang timbul akibat masalah agensi (Bergolf dan Pajuste, 2005).

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia menyatakan salah satu tujuan pelaksanaan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial mengharuskan perusahaan bertanggung jawab kepada multilevel *stakeholder* untuk melaporkan keberlanjutan perusahaan secara sukarela (Sun *et al.* 2009). Pengungkapan lingkungan sebagai salah satu tanggung jawab sosial perusahaan merupakan cara untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari isu lainnya. Aspek *corporate governance* seperti dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi direksi wanita dalam perusahaan serta ukuran komite audit merupakan mekanisme pengendali yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi menekankan bahwa ada kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Berdasarkan hal tersebut, maka merupakan tanggung jawab organisasi untuk melaporkan dampak total terhadap masyarakat luas. “Kontrak sosial” tidak mudah didefinisikan tetapi konsepnya telah digunakan untuk merepresentasikan banyak pengharapan secara implisit dan eksplisit dari masyarakat tentang bagaimana organisasi seharusnya bersikap terhadap operasinya. Menurut teori ini, kelangsungan hidup organisasi selama ini berasal dari kekuatan pasar dan harapan masyarakat. O’Donovan

(2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung kelangsungan hidup suatu perusahaan (*going concern*).

Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka dirasakan oleh kelompok luar sebagai sesuatu yang sah (*"legitimate"*). Menurut Lindblom (Deegan, 2000) legitimasi adalah :

“...sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.”

Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik (Deegan dan Rankin, 1996). Jika organisasi tidak dapat membenarkan operasi berlanjut, maka hal itu berarti bahwa masyarakat dapat mencabut "kontrak" untuk melanjutkan operasinya. Hal ini dapat terjadi melalui pengurangan konsumen atau menghilangkan permintaan untuk produk-produk dari bisnis, faktor pemasok menghilangkan pasokan tenaga kerja dan modal keuangan untuk bisnis, atau konstituen melobi pemerintah untuk meningkatkan pajak, denda atau undang-undang untuk melarang tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Deegan dan Rankin, 1996).

Shocker dan Sethi dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut :

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial-baik eksplisit maupun implisit-dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada :

1. Hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan *power* yang dimiliki

Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber *power* institutional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan (*reward*) yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007)

Dowling dan Pfeffer (dalam Ghozali dan Chariri, 2007) mengatakan bahwa legitimasi tidak dapat didefinisikan hanya dengan mengatakan “apa yang legal atau ilegal”. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat “implisit” dan “eksplisit”, Menurut Deegan (dalam Ghozali dan Chariri, 2007) bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal sementara bentuk implisitnya adalah “harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal (*uncodified community expectation*)”.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori legitimasi diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu contoh implementasi harapan dari masyarakat terhadap suatu organisasi atau perusahaan adalah pelaporan lingkungan yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari operasi produksi suatu organisasi untuk meninjau dampak atau akibat apa saja yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. Pelaporan lingkungan tersebut juga dapat dikatakan sebagai pengawasan pengungkapan lingkungan yang diberikan agar apabila operasi produksi yang dilakukan berhubungan dengan pengambilan unsur dari lingkungan sekitar maka tidak melanggar peraturan yang ada dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu, pelaporan lingkungan ini juga menjawab rasa penasaran masyarakat sekitar terhadap perusahaan dan masalah lingkungannya yang meletakkan harapannya agar perusahaan dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka dirasakan oleh kelompok luar sebagai sesuatu yang sah (*“legitimate”*).

2.2 Pengungkapan Lingkungan

Pengungkapan (*disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan adalah alat yang penting untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan hidup dan sosial suatu perusahaan (Agrifood, 2004 dalam Suhardjanto dan Miranti 2010). Berdasarkan banyaknya tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan harus menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (*profit*) dengan kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*) atau disebut *triple bottom-*

line performance (Elkington's, 1998). *Triple Bottom Line* (TBL), seperti yang dibahas diatas, adalah hasil dari perusahaan-perusahaan yang mengakui mereka memiliki tanggung jawab yang lebih luas terhadap masyarakat termasuk pemegang saham dan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. Menurut CPA (2002), TBL adalah metode dimana organisasi dapat melegitimasi operasi mereka dalam hal keberlanjutan jangka panjang. Penyelarasan ketiga kinerja tersebut pada akhirnya akan membuat perusahaan dapat menjalankan operasinya secara legal dalam jangka panjang dan mampu menghasilkan keuntungan yang berlimpah atau keuntungan yang konsisten secara terus menerus.

Disclosure meliputi ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, dapat dibuat di dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*) atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Sembiring 2005). Pengungkapan informasi berisi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungan hidupnya (Belkaoui, 2000 dalam Yusnita 2010).

Tinker et al (1991) dalam Ghazali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa Pengungkapan Sosial dan Lingkungan (PSL) pada dasarnya merupakan refleksi atas munculnya konflik sosial kapitalis dengan kelompok lain (seperti pekerja, kelompok pecinta lingkungan, konsumen dan lainnya). Tinker dan Niemark (1984) dalam Ghazali dan Chariri (2007) yakin bahwa:

“...publik, secara umum, menjadi makin sadar atas konsekuensi negatif dari pertumbuhan perusahaan... Publik menekan bisnis dan pemerintah untuk mengeluarkan dana guna memperbaiki atau mencegah lingkungan fisik, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen, pekerja dan mereka yang tinggal

di lingkungan dimana produk dibuat dan limbah dibuang, dan untuk bertanggung jawab terhadap konsekuensi timbul dari adanya penutupan pabrik dan pengangguran karena teknologi.”

Beberapa hal penting dibahas oleh Deegan (2002) yaitu: keinginan untuk memenuhi persyaratan hukum, pertimbangan rasionalitas ekonomi, akuntabilitas dan tanggung jawab keyakinan, sesuai dengan persyaratan meminjam, harapan masyarakat, daya tarik investasi dana, etis dan kesempatan untuk menang penghargaan pelaporan. Namun, organisasi memiliki keinginan untuk melegitimasi operasi mereka dianggap salah satu motivasi utama dan dianut oleh banyak peneliti (Cho dan Patten, 2007; Deegan, 2002; de Villiers dan van Staden, 2009; Donovan, 2002 a, b; van Staden dan Hooks, 2007). Lebih lanjut, Adams dan Zutshi (2004) percaya bahwa pelaporan lingkungan dapat meningkatkan pengembalian keuangan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan walaupun mungkin tidak akan dapat diukur.

Deegan (1999, p.40) menganggap bahwa pelaporan lingkungan adalah penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang organisasi dan memastikan bahwa tidak ada hal yang dapat merusak reputasi dan kelangsungan hidup dari organisasi. Argumen yang mendukung untuk pelaporan lingkungan menunjukkan bahwa profitabilitas entitas, serta keberadaannya, dapat terpengaruh oleh kinerja lingkungan. Lebih lanjut, Gibson dan O'donovan (2007) menyatakan bahwa peningkatan pelaporan lingkungan dapat dicapai dengan *corporate governance* yang kuat, yang mencakup penyediaan informasi lingkungan untuk *stakeholder*. Dengan demikian, meskipun ada indikasi bahwa *corporate governance*

memainkan peran dalam pelaporan lingkungan, hanya jumlah terbatas dari penelitian yang telah dilakukan yang menganggap hubungan ini.

Pengungkapan informasi lingkungan hidup perusahaan masih bersifat *voluntary, unaudited dan unregulated* (Mathews, 1984 dalam Suhardjanto 2010). Namun demikian, banyak institusi yang telah menggunakan pedoman sebagai indikator, diantaranya adalah *Global Reporting Initiatives (GRI)*. GRI merekomendasikan beberapa aspek lingkungan yang harus diungkapkan dalam *annual report*. Ada 30 item yang direkomendasikan oleh GRI dan terdiri dari 9 aspek utama. Kesembilan aspek tersebut adalah: material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi dan limbah, produk dan jasa, ketaatan pada peraturan, transportasi, serta keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pengungkapan informasi lingkungan hidup di dalam laporan tahunan pada awalnya merupakan sesuatu yang masih bersifat *voluntary* atau sukarela, sehingga ada tidaknya pengungkapan ini dalam laporan tahunan bergantung pada peraturan dan pengawasan masing-masing perusahaan (Ahmad dan Sulaiman, 2004). Namun, pada saat ini pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia telah menjadi kewajiban bagi perseroan terbatas untuk mengungkapkannya dalam laporan keberlanjutan maupun dalam laporan tahunan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa dalam laporan tahunan diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sedangkan pasal 74 ayat 1 tertulis bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penelitian Pflieger, *et al.* (2005) menunjukkan bahwa usaha pelestarian lingkungan hidup oleh perusahaan akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya adalah meningkatnya ketertarikan para investor dan *stakeholder* terhadap keuntungan perusahaan akibat pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab dalam penilaian masyarakat.

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa lepas dari konflik sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang semakin memperhatikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* termasuk di dalamnya *environmental disclosure* (pengungkapan informasi lingkungan). Dengan semakin banyaknya penelitian akuntansi mengenai *environmental disclosure* maka diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pengungkapan di Indonesia.

2.3 Corporate Governance

2.3.1 Definisi Corporate Governance

Pertama kali, Istilah *corporate governance* diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Cadbury Committee* mendefinisikan *corporate governance* sebagai: “seperangkat sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance adalah sistem dimana perusahaan bisnis diarahkan dan diawasi. Struktur tata kelola perusahaan menentukan pendistribusian hak dan tanggung jawab antara peserta yang berbeda dalam corporation, seperti dewan, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan merinci aturan dan prosedur pengambilan keputusan pada urusan perusahaan. Dengan melakukan ini, juga menyediakan struktur melalui mana tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja. ”

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Surat Edaran Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. S-106/M-PM.PBUMN/2000 mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“*Corporate governance* adalah segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.”

Banyak peneliti yang menyarankan mekanisme *corporate governance* sebagai solusi untuk masalah agensi (Eng dan Mak, 2003; Shan, 2009). Meskipun *corporate governance* merupakan solusi potensial untuk masalah agensi, *corporate governance* secara lebih luas terkonsentrasi pada melindungi minat dari *stakeholder* (Canadian Institute of Chartered Accountants, 1995; Donnelly and Mulcahy, 2008; Wise dan Ali, 2008). Maka diharapkan bahwa dengan adanya sistem *corporate governance* yang efektif tersebut memiliki efek positif pada kinerja korporasi, baik keuangan dan non-keuangan.

Corporate governance mendorong perusahaan untuk mempromosikan etika, keadilan, transparansi dan akuntabilitas di semua hubungan mereka (Jamali et al.,2008) dan meningkatkan sebuah pengungkapan berbasis lingkungan di mana manajer adalah dipaksa untuk bertindak bagi kepentingan pemegang saham dan para *stakeholder* (Hamilton, 2004). Perusahaan dengan struktur *governance* yang efektif akan menyediakan dokumen lebih banyak ke pasar (Beekes et al., 2008). Lebih lanjut, perusahaan yang lebih mungkin untuk menghilangkan bahan informasi yang relevan kepada stakeholder dengan tidak adanya persyaratan wajib dan mekanisme tata kelola yang tidak efektif (Unerman et al.,2007, dikutip dalam Mathews, 2008) dan masalah asimetri informasi ini bisa diatasi dengan *good corporate governance*, khususnya oleh direksi yang efektif (Donnelly dan Mulcahy, 2008).

2.3.2 Prinsip dasar Corporate Governance

Prinsip dasar GCG yang disusun terutama oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*), berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi secara terbuka, benar, kredibel, tepat waktu, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas informasi.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), prinsip ini berhubungan dengan adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban yang mengendalikan organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku .
4. Independensi (*Independency*), atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Struktur Corporate Governance

Menurut FCGI, dalam suatu praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*), terdapat dua sistem *corporate governance* yang berbeda, yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda. Sistem tersebut adalah *one tier system* dari Anglo Saxon dan *two tier system* dari Kontinental Eropa. Negara-negara dengan *one tier system* misalnya Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara dengan *two tiers system* adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Di Indonesia, sistem yang digunakan yaitu *two tiers system* untuk struktur dewan dalam perusahaan.

Dalam *two tier system* ini, terdapat dua organ perusahaan yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Menurut Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Sistem *corporate governance* yang efektif memiliki efek positif pada kinerja korporasi secara umum, baik keuangan maupun non-keuangan. *Corporate governance* mendorong perusahaan untuk mempromosikan etika, keadilan, transparansi dan akuntabilitas di semua hubungan mereka (Jamali *et al.*, 2008) dan meningkatkan sebuah pengungkapan berbasis lingkungan di mana manajer adalah dipaksa untuk bertindak bagi kepentingan pemegang saham dan para *stakeholder* (Hamilton, 2004). Salah satu studi baru-baru ini (Beekes *et al.*, 2008) ditemukan bahwa firma-firma dengan *corporate governance* yang efektif menyediakan lebih banyak dokumen ke pasar. Itu karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari *good corporate governance* akan meningkatkan keterbukaan dari pengungkapan perilaku organisasi-organisasi. Pengaruh tersebut dari *corporate governance* di pengungkapan perilaku organisasi dalam bagian pengungkapan lingkungan tertentu adalah fokus studi ini.

2.3.3.1. Dewan Komisaris Independen

Independensi dewan komisaris adalah permasalahan *corporate governance* yang paling diperdebatkan dihadapi oleh perusahaan. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris,

serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen memiliki peran penting bagi perusahaan. Hal tersebut diterima secara luas bahwa independensi dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan serta kinerja perusahaan secara keseluruhan (Bonn,2004 ; Shah *et al.*,2008; O'Neal dan Thomas, 1995).

Menurut Keputusan Ketua Bapepam No. 29/PM/2004, komisaris independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang: (i) berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, (ii) tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, (iii) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama dari emiten atau perusahaan publik, (iv) dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Direktur dari luar perusahaan biasanya dapat lebih baik dalam memonitor tanggung jawab manajemen pada posisi non resmi dalam organisasi (Donnelly dan Mulcahy, 2008) dan memiliki insentif untuk membangun reputasi sebagai ahli monitor yang menghalangi mereka dari persekongkolan dengan di dalam direksi (Carter *et al.*, 2003).

2.3.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan konsentrasi ini dianggap sebagai aspek penting dari tata kelola perusahaan apakah itu tersebar atau terkonsentrasi (Habib dan Jiang, 2009;

Shan, 2009). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan) dan diukur dengan presentase saham dipegang oleh pemegang saham institusional. Masalah keagenan utama dalam perusahaan dengan kepemilikan institusional ini adalah konflik antara pemegang perusahaan dengan pemegang saham minoritas. Apabila tidak terdapat hukum yang memadai, pemegang saham pengendali dapat melakukan aktivitas yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham lain (Tarjo, 2008). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Arif 2006 dalam Machmud & Djaman 2008).

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan yang substansial sehingga memiliki kepentingan yang besar terhadap kinerja perusahaan. Pemegang saham tersebut dapat mengawasi kinerja perusahaan dan perilaku manajemen dalam rangka melindungi kepentingan investasi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, di bawah kepemilikan terkonsentrasi, manajer dapat lebih mempengaruhi nilai perusahaan termasuk nilai lingkungan (Halme dan Huse,1997) serta untuk melindungi kepentingan pemegang saham dalam perusahaan dan maka organisasi itu sendiri menjadi kurang independen di bawah kepemilikan sangat terkonsentrasi.

2.3.3.3 Ukuran dewan komisaris

Di Indonesia, sistem *corporate governance* yang digunakan yaitu *two tiers system* untuk struktur dewan dalam perusahaan dimana terdapat dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam hal ini, suatu ukuran dewan komisaris bisa dilihat dari

jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan tersebut. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Tugas dewan komisaris dijelaskan secara lebih terperinci pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 1 dan 2 yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Semakin efisien suatu perusahaan maka akan berdampak pada semakin efisiennya sistem laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan semakin meningkatnya laporan yang dibuat secara sukarela seperti pelaporan mengenai lingkungan.

2.3.3.4 Proporsi direksi wanita

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya pada masa saat ini tidak lepas dari tangan para wanita. Tidak hanya pria saja yang dibutuhkan untuk memegang posisi penting dalam perusahaan seperti posisi direksi. Wanita yang dahulu sering dipandang lemah dan tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh pria justru pada saat ini sangat dibutuhkan di dalam suatu

perusahaan. Posisi direksi saat ini sedikit banyak sudah diperankan oleh para wanita karena wanita dinilai dapat lebih berkomitmen dalam keterlibatannya di suatu pekerjaan, lebih memiliki persiapan yang matang dibandingkan para pria dalam menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi, lebih rajin untuk mengajukan pertanyaan yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan akhirnya membuat suasana yang baik di ruang rapat. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2004) menemukan bahwa lebih banyak wanita dalam perusahaan dapat meningkatkan proses pembuatan keputusan, meningkatkan efektivitas perusahaan dan bahwa wanita memiliki kehadiran/partisipasi lebih baik.

2.3.3.5 Ukuran komite audit

Dalam mewujudkan *good corporate governance* dihubungkan dengan adanya pengungkapan perusahaan dalam hal lingkungan maka diperlukan suatu pengawasan dan pengendalian yang efektif. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Ratnasari, 2010). Dengan demikian, dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak mengalami perkembangan, baik secara sukarela maupun wajib mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial, pelaporan *sustainability report*, dan juga

pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terutama lebih spesifik dalam pengungkapan tentang lingkungan dari segi non-keuangan terhadap kinerja keuangan. Pada sub-bab ini akan diuraikan mengenai penelitian- penelitian terdahulu tentang pengungkapan lingkungan dan *corporate governance* yang dilakukan peneliti- peneliti sebelumnya.

Penelitian de Villiers et al (2009) dengan sampel 100 perusahaan top di Amerika Serikat menggunakan kinerja lingkungan perusahaan sebagai variabel dependen serta ukuran perusahaan, investor institusional, proporsi direktur independen dan CEO rangkap sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja lingkungan perusahaan berhubungan positif dengan ukuran perusahaan, berhubungan negatif dengan investor institusional, berhubungan positif dengan proporsi dari direktur independen dan berhubungan negatif dengan CEO rangkap.

Penelitian yang dilakukan oleh Theodora Cety Yusnita (2010) untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap *enviromental performance* dan *enviromental disclosure*. Data dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari 80 perusahaan peserta Program Peringkat Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2008 dari 627 perusahaan (*Press Briefing PROPER,2009*). Variabel dari penelitian ini adalah *enviromental performance*, *enviromental disclosure* dan proksi dari *corporate governance* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap *enviromental performance*, serta jumlah rapat komite audit, proporsi

komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, *size* perusahaan, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *enviromental performance*. Proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *enviromental disclosure*, serta *size* perusahaan berpengaruh positif terhadap *enviromental disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Djoko Suhardjanto dan Novita Dian Permatasari (2010) untuk menganalisis pengaruh *corporate governance*, latar belakang *culture* dan latar belakang pendidikan komisaris utama terhadap *enviromental disclosure*. Data dari penelitian ini adalah laporan tahunan dari 90 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2007. Variabel dari penelitian ini adalah *enviromental disclosure* dan proksi dari *corporate governance* variabel kontrol ukuran perusahaan (*size*) dan tipe industri. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan *logistic regression* yaitu hanya ukuran perusahaan (*size*) yang berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* sedangkan berdasarkan analisis regresi berganda yaitu proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan (*size*) dan latar belakang *culture* komisaris utama berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian ini yang dilakukan oleh Kathyayini Kathy Rao, Carol A. Tilt dan Laurence H. Lester (2012) untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap *enviromental disclosure*. Data dari penelitian ini adalah sampel 100 perusahaan yang listing pada *Australian Stock Exchange* (ASX) pada tahun 2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *enviromental*

disclosure sebagai variabel dependen dan *corporate governance* sebagai variabel independen yang meliputi komisar independen (*board independence*), kepemilikan institusi (*institutional ownership*), ukuran dewan (*board size*) dan proporsi wanita dalam dewan (*proportion of female directors*). Hasil dari penelitian ini adalah proporsi komisar independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, *institutional ownership* terdapat pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan, ukuran dewan terdapat pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan, proporsi wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar Effendi, Lia Uzliawati dan Agus Sholikhan Yulianto (2013) untuk menganalisis pengaruh dewan komisar terhadap *enviromental disclosure*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *enviromental disclosure* sebagai variabel dependen, ukuran dewan komisar, proporsi dewan komisar independen, latar belakang pendidikan presiden komisar, dan jumlah rapat dewan komisar sebagai variabel independen serta *size*, *profitabilitas*, dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisar, proporsi dewan komisar independen, latar belakang pendidikan presiden komisar, jumlah rapat dewan komisar, *profitabilitas*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Enviromental Disclosure*. Sedangkan *size* berpengaruh positif terhadap *Enviromental Disclosure*.

Penelitian tentang studi kali ini telah dilakukan pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
De Villiers et al (2009)	Analisis Regresi Berganda	<i>Board Size</i> , Investor institusional, proporsi dari direktur independen, CEO rangkap	<i>Board size</i> berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan, investor institusional berpegaruh negatif dengan kinerja lingkungan, proporsi dari direktur independen berpengaruh positif dengan kinerja lingkungan dan CEO rangkap berpengaruh negatif dengan kinerja lingkungan.
Theodora Cety Yusnita (2010)	Analisis Regresi Berganda	Variabel Dependen: <i>Environmental Performance</i> dan <i>Environmental Disclosure</i> Variabel Independen: Proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, Proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris Variabel kontrol: Ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas	Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap <i>enviromental performance</i> , serta jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, size perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>enviromental performance</i> . Proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, leverage dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>enviromental disclosure</i> , serta ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>enviromental disclosure</i> .

Djoko Suhardjanto dan Novita Dian Permatasari (2010)	Analisis <i>Logistic Regression</i> dan Regresi Berganda	<p>Variabel dependen: <i>Enviromental Disclosure</i></p> <p>Variabel independen : proporsi komisaris independen, latar belakang <i>culture</i> atau etnis komisaris utama, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit.</p> <p>Variabel kontrol: ukuran perusahaan (<i>size</i>) dan tipe industri.</p>	<p>Berdasarkan <i>logistic regression</i> yaitu hanya <i>firm size</i> yang berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>.</p> <p>Berdasarkan analisis regresi berganda yaitu proporsi dewan komisaris independen, <i>firm size</i> dan latar belakang <i>culture</i> komisaris utama berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>.</p>
Kathyayini, <i>et al.</i> (2012)	Analisis Regresi Linear	<p>Variabel dependen : <i>enviromental disclosure</i></p> <p>Variabel independen: Proporsi Komisaris Independen, <i>Institutional Ownership</i>, Ukuran</p>	<p>Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, <i>institutional ownership</i> terdapat pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan, ukuran dewan terdapat pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan, proporsi wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.</p>

		<p>Dewan, Proporsi wanita dalam dewan direksi</p> <p>Variabel kontrol: ukuran perusahaan (<i>firm size</i>), profitabilitas dan jenis industri</p>	
<p>Bahtiar Effendi, Lia Uzliawati dan Agus Sholikhhan Yulianto (2013)</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Variabel dependen : <i>Enviromental Disclosure</i></p> <p>Variabel independen : ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris.</p> <p>Variabel kontrol: <i>size</i>, <i>profitabilitas</i>, dan <i>leverage</i></p>	<p>Ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, <i>profitabilitas</i>, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Enviromental Disclosure</i>. Sedangkan <i>size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Enviromental Disclosure</i>.</p>

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Tabel 2.1 di atas merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu terhadap topik yang serupa. Penelitian terdahulu hampir rata – rata seluruhnya membahas

variabel mengenai dewan komisaris dan komite audit baik dari segi struktur maupun dari segi mekanisme *corporate governance* nya. Namun, beberapa penelitian diatas telah mengalami perkembangan variabel dari komponen *corporate governance*. Perkembangan variabel yang dimaksud ini seperti adanya variabel kepemilikan institusional dan proporsi direktur wanita dalam dewan direksi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Kathyayini Kathy Rao, Carol A. Tilt dan Laurence H. Lester (2012). Namun demikian, penelitian ini berbeda dalam beberapa hal yaitu variabel ukuran dewan komisaris (*board size*) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia menerapkan sistem dua tingkat atau *two tier board system* yang memisahkan fungsi direksi dan fungsi pengawasan (dewan komisaris), serta terdapat penambahan variabel independen yaitu jumlah komite audit untuk lebih memperkuat penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap *enviromental disclosure* . Selain itu pengambilan sampel penelitian dilakukan di Indonesia dengan berfokus pada perusahaan - perusahaan yang tergabung dalam National Centre Sustainability Reporting (NCSR) selama tahun 2009-2012.

2.5 Kerangka pemikiran

Hubungan logis antar variabel-variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dan dijabarkan dalam sub-bab kerangka pemikiran ini. Sebelum penyajian gambar mengenai kerangka pemikiran teoritis akan dijelaskan uraian mengenai hubungan *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan .

Berikut ini merupakan suatu penjelasan mengenai pengaruh hubungan antar variabel dependen dan independen. Beberapa tahun belakangan ini, laporan

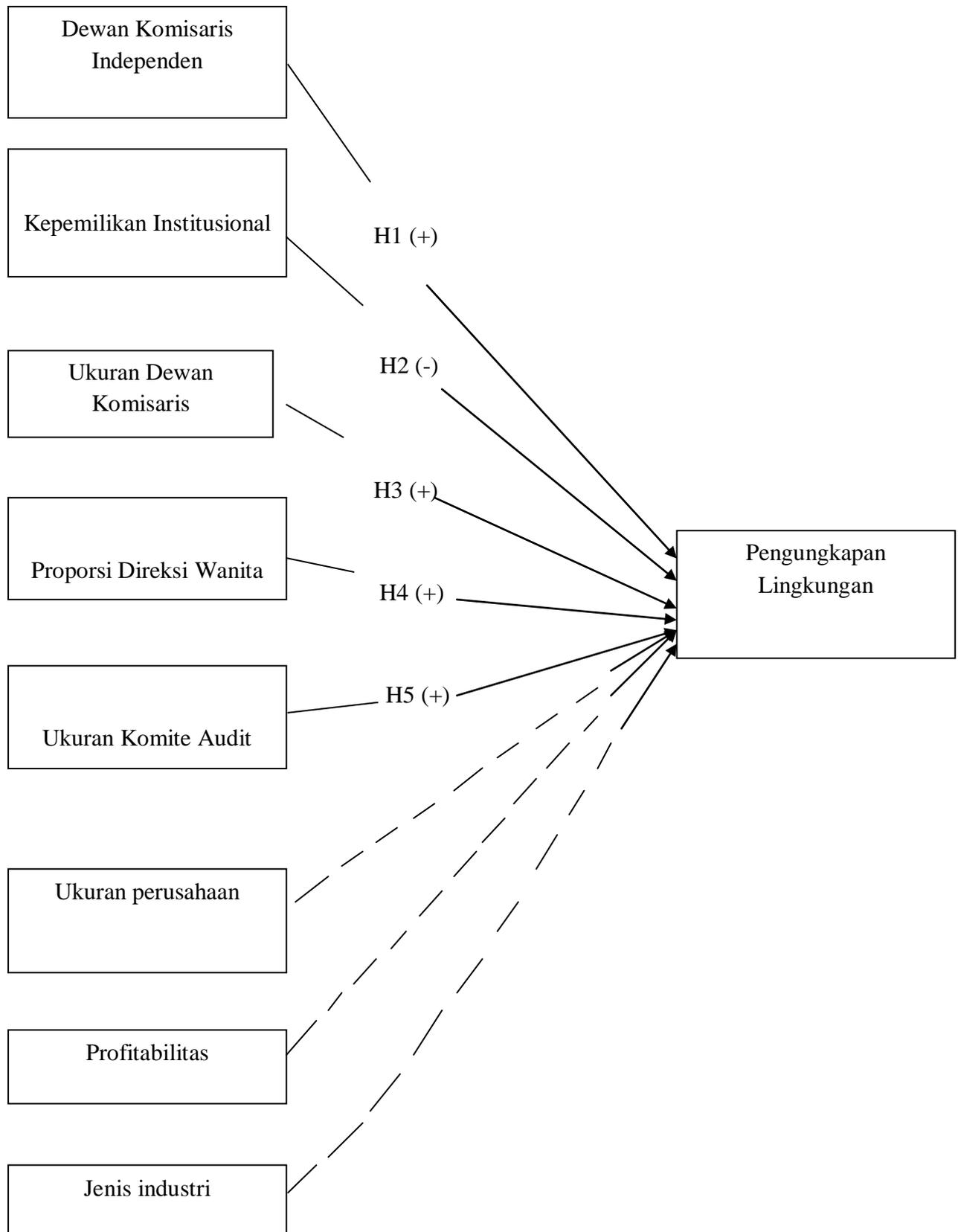
tahunan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tidak serta merta hanya berpusat pada laporan keuangan saja, tapi juga di dalamnya terdapat unsur – unsur non – keuangan seperti suatu pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Perusahaan yang mampu melaksanakan aktivitas bisnis perusahaan dalam proses produksinya dengan konsep ramah lingkungan untuk mengurangi dampak dari *global warming* tentu akan mampu menghasilkan pengungkapan lingkungan yang semakin baik. Demi transparansi pengungkapan lingkungan yang baik, Indonesia juga mulai mengeluarkan peraturan dan Undang-Undang mengenai pengelolaan lingkungan. Dengan begitu, secara tidak langsung terdapat dukungan dari pemerintah untuk mulai mewajibkan perusahaan yang aktivitas bisnisnya berpengaruh terhadap lingkungan agar melakukan pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan maupun laporan berkelanjutan.

Pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan atau laporan berkelanjutan dapat mencerminkan *good corporate governance*. Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan menerapkan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan peraturan yang ada akan termotivasi untuk memberikan pengungkapan lingkungan sukarela untuk menginformasikan investor atas strategi lingkungan untuk menunjukkan kesuksesan dari kinerja lingkungan perusahaan. Perusahaan yang menampilkan struktur *corporate governance* yang efektif akan menarik kepercayaan investor. Persepsi investor juga dipengaruhi oleh pengungkapan lingkungan. Para investor akan mengambil keputusan untuk menanamkan modal sahamnya di suatu perusahaan yang selalu menampilkan pengungkapan lingkungan yang berkualitas tinggi. Pernyataan di atas dibentuk

kerangka pemikiran teoritis untuk mempermudah pemahaman penelitian ini pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 di bawah merupakan hasil penggambaran secara logis hubungan antar variabel dalam penelitian yang dilakukan. Terdapat 5 variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam hipotesis 1 adalah dewan komisaris independen berpengaruh positif dengan variabel dependen pengungkapan lingkungan. Dalam hipotesis 2 variabel independen adalah kepemilikan institusional yang berpengaruh negatif dengan variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan. Dalam hipotesis 3 variabel independen adalah ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif dengan variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan. Dalam hipotesis 4 variabel independen adalah proporsi direksi wanita yang berpengaruh positif variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan. Dalam hipotesis 5 variabel independen adalah ukuran komite audit yang berpengaruh positif dengan variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan. Garis lurus memiliki arti bahwa adanya pengaruh antara variabel independen dengan dependen dan membentuk hipotesis dalam penelitian ini. Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan jenis industri merupakan variabel kontrol dan diwakili oleh garis putus-putus yang mengarah pada variabel dependen.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.6 Pengembangan Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian- penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pembahasan terperinci terkait rumusan hipotesis disajikan sebagai berikut.

2.6.1 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Diterima secara luas bahwa dewan independen meningkatkan efektivitas dewan dan dengan demikian meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Bonn, 2004; Shah *et al.*, 2008; O'Neal dan Thomas, 1995). Berdasarkan teori agensi dijelaskan bahwa memiliki proporsi dewan komisaris independen yang semakin besar akan memudahkan dilakukan pengendalian serta pengawasan terhadap agen dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Dewan komisaris independen meningkatkan transparansi perusahaan dan secara sukarela mengungkapkan informasi tambahan (Chen dan Jaggi, 2000; Donnelly dan Mulcahy, 2008; Cheng dan Courtenay, 2006). Mereka adalah... kurang selaras dengan manajemen (Eng dan Mak, 2003, p. 331) dan karena itu memiliki kapasitas untuk memaksa manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (Cahaya *et al.*, 2009). Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka

cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholdernya*.

Melalui ketentuan peraturan Pencatatan Efek BEI tanggal 1 Juli 2000 No. IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, keberadaan komisaris independen telah diatur. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam dewan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Webb (2004) dalam Said, *et al.* (2009) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan dengan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungannya. Menurut De Villiers *et al.* (2009) dewan dengan lebih banyak komisaris independen memaksa para manajer untuk mengambil keputusan dalam mendukung kegiatan lingkungan, dan mereka menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang kuat memiliki lebih komisaris independen. Diharapkan karena ini dewan komisaris independen yang dianggap mewakili kepentingan *stakeholders* lainnya, mereka akan memiliki lebih berpengaruh pada pelaporan lingkungan (Haniffa dan Cooke, 2005). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1. Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

2.6.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan

Kepemilikan konsentrasi dianggap sebagai aspek penting dari *corporate governance* apakah itu tersebar atau terkonsentrasi (Habib dan Jiang, 2009; Shan, 2009). Kepemilikan institusional adalah salah satu bentuk kepemilikan terkonsentrasi dan diukur dengan persentase saham dipegang oleh pemegang saham institusional. Mereka termasuk bank dan pemasok dana untuk pasar keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun dan perusahaan investasi (Lakhal, 2005).

Memiliki mayoritas investor institusional dapat mengurangi efektivitas dewan. Investor besar lebih cenderung mendominasi dan mempengaruhi keputusan manajemen (Lau *et al.*, 2009) karena mereka memegang saham dalam jumlah besar dalam perusahaan. Hal ini menyebabkan kurangnya aktivitas perusahaan serta kurangnya direksi independen (Bergolf dan Pajuste, 2005) dan kadang-kadang bahkan mungkin membatasi atau membatasi keputusan manajer (Lakhal, 2005).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), peningkatan permintaan untuk informasi adalah karena pemisahan kepemilikan dan kontrol. Pemegang saham institusional akan meminta pengungkapan yang lebih banyak agar dapat mengakses informasi internal dengan mudah. Namun, pemegang saham menginginkan dapat dengan mudah untuk mengakses informasi yang diinginkan, dan di lain pihak pemegang saham dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi yang minimum terhadap publik (Laidroo, 2009). Ini

akhirnya mengakibatkan penurunan pengungkapan keseluruhan yang dibuat oleh perusahaan. Studi ini juga menunjukkan bahwa investor institusional yang memiliki kurang dari 25 persen kontrol kepemilikan terbatas atas perusahaan, dan untuk menarik modal dari sumber lain, perusahaan harus memberikan lebih banyak keterbukaan. Bertentangan dengan pandangan ini, penelitian sebelumnya telah berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara pengungkapan dan kepemilikan institusional (Donnelly dan Mulcahy, 2008; Laidroo, 2009). Akan tetapi, sebagian besar studi telah menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan perusahaan (Habib dan Jiang, 2009; Shan, 2009; Lakhali, 2005). Pemegang saham yang kuat sering memiliki lebih banyak pengaruh pada keputusan manajemen dan maka organisasi itu sendiri menjadi kurang independen di bawah kepemilikan sangat terkonsentrasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan.

2.6.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dengan pengungkapan lingkungan

Ukuran dewan, yaitu jumlah dewan komisaris di perusahaan, memainkan peran penting dalam pemantauan kinerja perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan memudahkan dilakukan pengendalian terhadap agen dan mencegah terjadinya penyimpangan. Ukuran dewan komisaris telah ditemukan hubungannya baik positif maupun negatif yang terkait dengan kinerja perusahaan.

Lebih kecil ukuran dewan komisaris maka lebih efektif dalam pemantauan tindakan manajemen (Lakhal, 2005) dan dapat berfungsi secara efektif seperti mereka dapat membuat keputusan bulat dengan mudah (Jensen, 1993; Cheng, 2008). Penelitian lain berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris lebih besar lebih efektif karena mereka dapat membawa lebih banyak pengalaman, pengetahuan dan menawarkan saran yang lebih baik (Dalton *et al.*, 1999; Bonn, 2004). Ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan kemampuan monitoring perusahaan dan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Pfeffer dan Salancik, 2003).

Banyak studi sebelumnya menghubungkan ukuran dewan dengan pengungkapan. Pengalaman dewan komisaris diukur dalam jajaran anggota dewan perusahaan sejak mereka lebih cenderung untuk berbagi pengalaman luas dan keahlian mereka dalam pemantauan manajemen dan anggota dewan akan berperforma lebih baik (Kosnik, 1987 dalam Gul dan Leung, 2004). Mereka juga lebih cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk menjadi pengawas yang efektif manajemen dalam rangka menjaga reputasi modal mereka atau memperbaiki pasar tenaga kerja eksternal mereka (Kaplan dan Reishus, 1990). Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring 2005, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

2.6.4 Pengaruh proporsi direksi wanita terhadap pengungkapan lingkungan

Tingkat keanekaragaman di perusahaan dapat mempengaruhi keputusan dan aktivitas mereka (Adams dan Ferreira, 2004). Teori agensi menjelaskan bahwa adanya direksi wanita dapat mengurangi konflik agensi dan mencegah terjadinya penyimpangan karena direksi wanita dapat mengelola perusahaan dengan baik untuk jangka panjang. Dengan adanya peningkatan perbedaan gender tersebut dapat dilihat bahwa perempuan dapat membuat kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Huse dan Solberg (2006) menemukan bahwa wanita lebih berkomitmen dan terlibat, lebih siap, lebih rajin, mengajukan pertanyaan dan akhirnya membuat suasana yang baik di ruang rapat. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2004) menemukan bahwa lebih banyak wanita dalam perusahaan dapat meningkatkan proses pembuatan keputusan, meningkatkan efektivitas perusahaan dan bahwa wanita memiliki kehadiran/partisipasi lebih baik.

Selain kinerja perusahaan, memiliki lebih banyak direksi wanita pada perusahaan juga dapat memiliki efek positif pada pengungkapan, keuangan dan non keuangan; wanita pada perusahaan mungkin memiliki efek sinyal yang penting kepada pemangku kepentingan. Menurut Ibrahim dan Angelidis (1994) direktur wanita menunjukkan tanggung jawab besar, dalam analisa mereka, mereka menemukan bahwa wanita lebih didorong kedermawanannya dan kurang peduli dengan kinerja ekonomi. Argumentasi lain yang mendukung memiliki lebih banyak direksi wanita adalah bahwa mereka mampu meningkatkan independensi perusahaan (Kang *et al.*, 2007) dan independensi merupakan faktor

penting yang meningkatkan akuntabilitas, dan dengan demikian memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pengungkapan. Dengan kata lain, keterlibatan aktif direksi wanita, persiapan lebih baik, independensi dan kualitas unik lainnya, memungkinkan mereka untuk membuat kontribusi yang signifikan dalam diskusi yang kompleks dan keputusan seperti pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4. Proporsi direksi wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan

2.6.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit dengan pengungkapan lingkungan

Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang “Komite Audit” menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit tidak hanya harus terdapat di dalam perusahaan publik saja, tetapi menurut KNKG (2006), perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Said *et.al*, 2009). Berdasarkan

FCGI (2002), komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Hal ini dikarenakan untuk menjaga integritas serta objektivitas dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan.

Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik pengungkapan lingkungan perusahaan. Penelitian oleh Handajani dkk (2008) menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) dalam Said *et.al.* (2009) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai definisi dan operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Berikut penjelasan secara rinci.

3.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Secara umum dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan perusahaan mengenai lingkungan. Variabel pengungkapan lingkungan dilambangkan dalam variabel *env_disc*.

Pengungkapan lingkungan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan skor sesuai item pengungkapannya. Item pengungkapan lingkungan didasarkan pada pedoman indeks CSR yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). Pemilihan pengukuran menggunakan indeks GRI tidak menggunakan pengukuran dengan menghitung total kata – kata yang didedikasikan terhadap lingkungan dikarenakan menurut peneliti jumlah total kata-kata tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak dapat mencerminkan kinerja

perusahaan secara sebenarnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap lingkungan, selain itu pedoman indeks GRI merupakan pedoman yang sudah jelas memiliki indikator - indikator yang diakui secara Internasional serta telah digunakan di banyak negara. Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), dan sosial yang terdiri dari: praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), serta tanggung jawab produk (9 item). Variabel ini diukur dengan perbandingan antara jumlah item pengungkapan yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah item pengungkapan lingkungan berdasarkan GRI.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel bebas atau independen sering disebut juga variabel predictor, stimulus, input, antecedent atau variabel yang mempengaruhi (Sekaran,2006). Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (terikat). Sehingga variabel independen dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris Independen

Variabel dewan komisaris independen dinyatakan dengan lambang variabel p_inddir . Variabel p_inddir digunakan untuk menggambarkan bahwa terdapat pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG,2006).

Variabel ini diukur dengan perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah total semua komisaris.

2. Kepemilikan institusional (*institutional ownership*)

Kepemilikan institusional adalah salah satu bentuk kepemilikan terkonsentrasi dimana kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh suatu institusi (badan). Variabel independen kepemilikan institusional dinyatakan dengan lambang variabel *inst_inv*. Variabel *inst_inv* digunakan untuk menggambarkan kepemilikan saham oleh suatu institusi atau badan di dalam perusahaan. Variabel ini diukur dengan presentase saham dipegang oleh investor institusional (Kathy Rao, Carol A.Tilt dan Lester, 2012).

3. Ukuran dewan komisaris

Suatu ukuran dewan bisa dilihat dari jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan tersebut. Dewan komisaris yang dimaksud sangat berperan penting untuk mengawasi dan memantau kinerja dari perusahaan. Variabel independen ukuran dewan dinyatakan dengan lambang variabel *tot_kom*. Variabel ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan jumlah seluruh anggota yang duduk dalam dewan komisaris yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dilihat dari *annual report* masing-masing perusahaan (Kathy Rao, Carol A.Tilt dan Lester, 2012).

4. Proporsi direksi wanita

Tingkat keanekaragaman di perusahaan mempengaruhi keputusan dan aktivitas mereka (Adams dan Ferreira, 2004). Salah satu bentuk keanekaragaman itu adalah jenis kelamin. Dengan adanya peningkatan proporsi direksi wanita maka menunjukkan bahwa wanita dapat membuat kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Variabel independen proporsi direksi wanita dinyatakan dengan lambang variabel p_femdir . Variabel proporsi direksi wanita dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan seberapa kuat perusahaan tata kelolanya apabila dipimpin oleh seorang wanita sebagai direksi. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota direksi wanita yang ada dibandingkan dengan jumlah seluruh direksi yang ada dilihat dari *annual report* masing-masing perusahaan (Kathy Rao, Carol A.Tilt dan Lester, 2012).

5. Ukuran komite audit

Komite audit merupakan individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif (FCGI,2002). Variabel ini merupakan variabel tambahan untuk membedakan dengan penelitian terdahulu yang dipilih karena menurut KNKG komite audit merupakan komite yang sekurang-kurangnya harus dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan dan komite audit secara tidak langsung merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu fungsi serta

tugas pengawasannya terhadap dewan direksi. Variabel independen komite audit dinyatakan dengan lambang variabel *kom_dit*. Variabel *kom_dit* digunakan untuk menggambarkan peran pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan atas pengungkapan yang dilakukan. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan (Sun dkk, 2010).

3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol untuk mengontrol variabel lain yang mempengaruhi faktor – faktor lain tentang pengungkapan lingkungan. Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat memberi pengaruh dan mengontrol hubungan variabel dependen dan variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dari total aset dan pendapatan operasi yang mungkin juga mempengaruhi cakupan pengungkapan lingkungan di dalam laporan keuangan tahunan, profitabilitas yang diukur dari ROA dan jenis industri yang diukur dengan menggunakan variabel dummy.

1. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah alat untuk mengukur suatu perusahaan berdasarkan aturan tertentu. Banyak studi telah menemukan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan (Donnelly dan Mulcahy, 2008; Eng dan Mak, 2003; Gul dan Leung, 2004; Ho dan Wong, 2001; Laidroo, 2009; Lakhali, 2005). Ukuran

perusahaan yang digunakan dalam studi ini diukur dengan total aset dan pendapatan operasi. Pengukuran menggunakan total aset dan pendapatan operasi karena dua ukuran tersebut merupakan gambaran yang mewakili seberapa besar perusahaan tersebut.

2. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Variabel ini dinyatakan dengan lambang *ret_ta* dan diukur dengan menggunakan rasio perputaran aset (*return on asset*).

3. Industri

Klasifikasi industri yang dipakai dalam penelitian menggunakan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang termuat dalam *Fact Book* yang terbagi dalam 9 sektor industri menurut Bursa Efek Indonesia adalah: 1) *Agriculture* 2) *Mining* 3) *Basic Industry and Chemicals* 4) *Miscellaneous Industry* 5) *Consumer Goods Industry* 6) *Property, Real Estate and Building Construction* 7) *Infrastructure, utilities & transportation* 8) *Finance* 9) *Trade, Services & Investment*.

Klasifikasi yang terbagi dalam 9 kelompok jenis industri, kemudian akan diklasifikasikan lagi sesuai dengan data dalam penelitian, sehingga diperoleh klasifikasi sebagai berikut: 1) *Agriculture* 2) *Mining* 3) *Basic Industry and Chemicals* 4) *Miscellaneous Industry* 5) *Consumer Goods Industry* 6) *Property, Real Estate and Building Construction* 7) *Infrastructure, utilities & transportation* 8) *Finance* Jenis industri

merupakan variabel dummy. Industri yang tergolong klasifikasi tersebut diberi skor 1 dan industri lainnya diberi skor 0.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan *Sustainability Report*. Pemilihan populasi ini dikarenakan perusahaan yang mengungkapkan *Sustainability Report* tersebut yang lebih banyak melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sesuai dengan variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu pengungkapan lingkungan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam NCSR (*National Centre Sustainability Reporting*) selama tahun 2009-2012. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria – kriteria tertentu.

Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan - perusahaan yang tergabung dalam NCSR (*National Centre Sustainability Reporting*) tahun 2009-2012.
2. Perusahaan memiliki data yang lengkap mengenai pelaksanaan pengungkapan lingkungan (menggunakan indikator GRI) dan *corporate governance*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan yaitu berupa laporan keuangan tahunan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan

tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan berkelanjutan pada tahun 2009 hingga tahun 2012 dari perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan memerlukan pengungkapan lingkungan di dalam sebuah laporan. Data berupa laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan dapat diperoleh di Pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau di www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data empiris berupa sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan (*annual report*) yang diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.com dan langsung dari *website* perusahaan. Data yang diambil dari *website* berupa data laporan tahunan perusahaan (*annual report*) perusahaan dan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) pada tahun 2009 - 2012 dengan cara *download* semua data laporan yang dibutuhkan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan langkah studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Selanjutnya adalah studi pustaka yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu didapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, internet serta sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji regresi linear, statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini. Selain itu, dilakukan pengujian koefisien korelasi dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasan terperinci mengenai metode analisis dalam penelitian ini:

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2011). Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran data. Data yang memiliki standar deviasi yang semakin besar menggambarkan data tersebut semakin menyebar. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji F dan t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2011).

Normalitas residual dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik)

pada sumbu diagonal dari grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun, pengujian dengan melihat data histogram dapat menyesatkan khususnya untuk sampel kecil. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan melihat histogram residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya digunakan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, di samping uji grafik perlu dilakukan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Adapun dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)

adalah:

- a. Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual tidak berdistribusi normal.
- b. Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* lebih besar dari 0.05 maka H_a ditolak. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari hal berikut (Ghozali, 2011):

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan dari suatu regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
- b. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.9) maka mengindikasikan adanya multikolonieritas.
- c. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan dengan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, dengan kata lain tidak heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau heteroskedastisitas (Ghozali, 2011):

- a. Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.
- b. Jika ada pola tertentu pada grafik scatterplot seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.
- c. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y grafik scatterplot maka mengindikasikan tidak ada heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik memiliki kelemahan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Oleh sebab itu, maka diperlukan uji statistik yang lebih akurat. Alat uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah Uji Glejser dengan persamaan sebagai berikut:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji

yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji autokorelasi adalah Run Test. Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

H₀: residual (res_1) random (acak)

H_A: residual (res_1) tidak random

3.5.3 Analisis Regresi Linear

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai hipotesis 5 adalah uji regresi linear dengan menggunakan SPSS. Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dan menunjukkan arah hubungan variabel dependen dan independen. Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Analisis regresi linear ini digunakan untuk menunjukkan arah hubungan variabel dependen (pengungkapan lingkungan) dan variabel independen (*corporate governance*). Dalam analisis regresi linear ini, presentase pengungkapan lingkungan diregresikan dengan lima variabel dari *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi direksi wanita dan ukuran komite audit. Model analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{env_disc} = & \beta_0 + \beta_1 \text{p_inddir} + \beta_2 \text{inst_inv} + \beta_3 \text{tot_kom} + \beta_4 \text{p_femdir} + \\ & \beta_5 \text{cos_komdit} + \beta_6 \ln \text{tot_asst} + \beta_7 \text{op_rev} + \beta_8 \text{ret_ta} + \beta_9 \\ & \text{agri} + \beta_{10} \text{mining} + \beta_{11} \text{bas_ind} + \beta_{12} \text{aneka_ind} + \beta_{13} \\ & \text{cons_ind} + \beta_{14} \text{properti_ind} + \beta_{15} \text{infrastruktur_ind} + \beta_{16} \\ & \text{finance_ind} \end{aligned}$$

Dimana:

env_disc	= presentase pengungkapan lingkungan
p_inddir	= dewan komisaris independen
inst_inv	= kepemilikan institusional
tot_kom	= ukuran dewan komisaris
p_femdir	= proporsi direksi wanita
komdit	= ukuran komite audit
tot_asst	= total aset
op_rev	= pendapatan operasi
ret_ta	= profitabilitas
ind	= jenis industri

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (F test)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 10%. Jika nilai signifikansi $f < 0,1$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $f > 0,1$ artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (T test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Tingkat signifikan 10%, maka kriteria pengujian adalah :

1. Bila nilai signifikan $t < 0.1$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terdapat satu variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikan $t > 0.1$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terdapat variabel dependen.